

# Pendidikan politik dan pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan

*Political education and the development of an inclusive and participatory society for sustainable democracy*

**Anggreni Bako\*, Putra Kaslin Hutabarat, Aulia Rahmadini, Arsa Aufa, Alia Nursaifa**

Universitas Syiah Kuala, Indonesia

\* [anggrenibako130@usk.ac.id](mailto:anggrenibako130@usk.ac.id) (Primary Contact)

---

## ABSTRACT

---

### Keywords

Citizen empowerment, civil society, political education, political participation, sustainable democracy

### Article History

Received: 2025-07-23  
Accepted: 2025-08-04

This paper aims to explore the strategic role of political education in fostering an inclusive and participatory civil society in Indonesia. Political education is one of the important instruments to develop civic awareness, increase active citizen participation, and strengthen civil society as a democratic foundation. Through literature analysis and library research, it highlights the political education's role in shaping an autonomous, critical and contributive society towards sustainable democratic development. However, political education in Indonesia remains exposed to various challenges, such as limited participatory curricula, limited educational access, and pedagogical barriers. Consequently, innovative strategies and government policy support are needed to strengthen the effectiveness of political education as an effort to empower civil society in Indonesia. In doing so, the study proposes practical recommendations for policy makers, educational institutions and civil society organizations to strengthen citizens as agents of social change and enhance democracy.

---

Copyright © 2025, Bako, A. et al.  
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru  
DOI: [10.56113/takuana.v4i2.149](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i2.149)

---

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu instrumen penting untuk membangun masyarakat demokratis yang inklusif dan partisipatif adalah pendidikan politik. Dalam sistem demokrasi, warga negara tidak hanya diharuskan untuk memilih dalam pemilu tetapi mereka juga diharuskan untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan publik dan memahami dinamika politik. Pendidikan politik adalah upaya untuk mendidik warga negara tentang hak dan kewajibannya dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik (Prayugo & Prayitno, 2022). Selain itu, pendidikan politik juga merupakan instrumen membangun kesadaran politik kritis, bukan hanya informasi. Pendidikan ini mengajarkan struktur kekuasaan, prinsip-

prinsip demokrasi, dan cara pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, pendidikan politik yang baik semestinya menanamkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan supremasi hukum yang sangat penting untuk mengembangkan warga negara yang cerdas secara politik (Jayadi dkk., 2023).

Dalam konteks ini, peran *civil society* atau masyarakat sipil menjadi sangat signifikan. *Civil society* sebagai ruang sosial mandiri tempat warga negara berkumpul secara sukarela untuk memperjuangkan nilai dan kepentingan bersama (Diamond, 1994). Organisasi masyarakat sipil menjadi kanal partisipasi alternatif, tempat warga menyuarkan aspirasi, mengontrol kebijakan, dan mengadvokasi keadilan sosial.

Keterkaitan antara pendidikan politik dan masyarakat sipil bersifat timbal balik. Pendidikan politik yang kuat melahirkan warga negara yang aktif dalam organisasi masyarakat, sementara keberadaan masyarakat sipil membuka ruang bagi praktik demokrasi yang lebih luas (S. Sitepu, 2024). Oleh karena itu, pendidikan politik yang berkualitas dapat memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan dinilai terlalu normatif dan kurang kontekstual (Yunita dkk., 2025), sementara disisi lain, akses terhadap pendidikan politik belum merata di seluruh wilayah (Yasa dkk., 2025). Tantangan lainnya mencakup menguatnya budaya politik yang bersifat hierarkis serta dominasi aktor-aktor elite dalam memonopoli narasi dan ruang diskursus publik, sehingga mempersempit ruang partisipasi politik masyarakat secara luas.

Meski demikian, inisiatif pendidikan politik berbasis komunitas menunjukkan prospek cerah. Komunitas literasi Rumah Dunia di Banten, misalnya, berhasil menyelenggarakan pendidikan politik secara partisipatif dan kontekstual. Rumah Dunia menyampaikan isu-isu politik melalui pendekatan literasi budaya, kampanye anti-korupsi, serta diskusi publik berbasis komunitas (Nurfadilah, 2018). Hal ini membuktikan bahwa pendidikan politik non-formal yang berbasis lokalitas dapat membentuk kesadaran politik yang kuat dan membumi. Dengan demikian, pendidikan politik dan masyarakat sipil merupakan dua pilar utama dalam memperkuat demokrasi. Ketika pendidikan politik dijalankan secara efektif dan masyarakat sipil diberdayakan secara optimal, maka akan terbentuk masyarakat yang tidak hanya menjalani demokrasi secara prosedural, tetapi juga secara substansial. Artikel ini bertujuan mengkaji keterkaitan keduanya serta merumuskan strategi untuk memperkuat peran pendidikan politik dalam pembangunan masyarakat sipil di Indonesia.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber dan referensi yang relevan mengenai konsep *civil society* dan pendidikan politik, serta mengintegrasikan hasil studi dan teori dari berbagai penulis dan jurnal ilmiah. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran pendidikan politik dalam membentuk masyarakat inklusif dan partisipatif dalam konteks pembangunan demokrasi berkelanjutan di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan

analisis deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mendeskripsikan secara sistematis berbagai gagasan, pendekatan, dan temuan dari sumber-sumber literatur yang dikaji. Hasil analisis tersebut kemudian dikonstruksi untuk menunjukkan pola hubungan antara pendidikan politik dan penguatan masyarakat sipil, serta partisipasi politik warga negara dalam kerangka pembangunan demokrasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Civil society dan dilema pendidikan politik di Indonesia

Civil society (masyarakat sipil) merupakan ranah kehidupan sosial yang terdiri dari organisasi sukarela, asosiasi, dan jaringan yang didirikan oleh warga untuk mengekspresikan kepentingan, nilai, dan tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi, konsep civil society dibedakan secara tegas dari konsep “kelas menengah”, entitas korporasi bisnis, dan organisasi partai politik (Jb & Darmawan, 2016). Esensi dari masyarakat sipil terletak pada karakteristiknya sebagai organisasi sosial yang memiliki sejumlah atribut khas, yaitu: sifat otonom atau mandiri dalam pengelolaannya, prinsip kesukarelaan (*voluntary*) dalam keanggotaan dan partisipasi, status non-profit yang tidak mencari keuntungan finansial, kemampuan untuk mengandalkan sumber daya sendiri (*self-reliant*), serta orientasi yang bukan pada perolehan kekuasaan politik (Afriandi & Ariyadi, 2023; Nursahid, 2022). Rangkaian karakteristik inilah yang secara fundamental membedakan *civil society* dari berbagai bentuk institusi atau organisasi sosial lainnya yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, *civil society* seringkali dipahami sebagai organisasi sosial yang keberadaannya tidak menggantungkan diri pada negara (Nursahid, 2022). Artinya, *civil society* bukanlah entitas yang dibentuk atau didikte oleh negara. Keanggotaan dalam *civil society* berkembang dari adanya kesadaran individu dan kelompok masyarakat, bukan dari adanya paksaan atau cara-cara intimidasi. Sejalan dengan hal tersebut, *civil society* merupakan organisasi sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan komitmen untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi (Asrida dkk., 2021). Erfain (2025) juga menjelaskan bahwa *civil society* adalah salah satu wadah penting untuk ekspresi kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik. Dengan demikian, *civil society* adalah keseluruhan jaringan organisasi dan asosiasi sukarela yang berada di luar kontrol langsung negara, yang anggotanya berinteraksi secara bebas dan egaliter untuk mengejar kepentingan bersama (Agustina, 2024). Definisi ini menekankan dua aspek penting dari *civil society*, yaitu otonomi dari negara dan interaksi yang bebas dan setara antar anggota. Otonomi dari negara memungkinkan *civil society* untuk bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan dan mengkritisi kebijakan pemerintah, sementara interaksi yang bebas dan setara antar anggota menciptakan ruang untuk dialog, musyawarah, dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama (Hadi, 2010).

*Civil society* dianggap sebagai ruang di mana individu dan kelompok masyarakat dapat berinteraksi dengan toleransi dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik negara. Klasifikasi makna konsep *civil society* memberikan penekanan kepada tiga hal, yakni *civil society as associational life*, *civil society as the good society*, dan *civil society as the public sphere* (Asrida dkk., 2021). Pertama, *civil society* untuk kehidupan asosiasi (*associational life*) menekankan pada jaringan organisasi dalam masyarakat, bagaimana mereka terstruktur dan berinteraksi. Kedua, *civil society* sebagai warga negara yang baik

yang baik (*the good society*) berfokus pada nilai-nilai kewargaan seperti toleransi dan keadilan, serta kualitas hubungan sosial. Ketiga, *civil society* sebagai ranah publik (*the public sphere*) melihat *civil society* sebagai ruang diskusi publik, pertukaran ide, dan pembentukan opini. ketiga perspektif ini saling melengkapi dalam memahami peran kompleks *civil society* dalam demokrasi.

Politik Indonesia mengalami penyeragaman dan pembungkaman terhadap berbagai kekuatan politik sejak kemerdekaan (Nugroho, 2012; Sari & Widyastuti, 2021). Selain itu, partai politik memainkan peran penting dalam pendidikan politik dengan mendidik calon pemimpin nasional di pusat dan daerah, serta konstituen dan pemilih partai politik (E. Sitepu, 2016). Namun, peran ini tidak berjalan dengan baik. Pendidikan politik harus dilakukan secara proaktif oleh partai politik, dan mereka harus berusaha merekrut calon pemimpin terbaik dari generasi ini (Pasaribu, 2017).

Tidak cukup bagi partai politik Indonesia untuk mengaderisasi kepemimpinan politik. Akibatnya, mayoritas warga Indonesia tidak memahami hak dan kewajibannya secara politik (Belladonna, 2018). Di Indonesia, masalah pendidikan politik terjadi di tingkat daerah dan lokal selain di tingkat nasional. Hanya pada saat kontestasi politik tertentu, seperti pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, warga negara dapat berpartisipasi secara politik. Namun, publik jarang terlibat dalam keputusan politik yang dibuat oleh pihak berwenang setelah kandidat terpilih dan berkuasa. Selain itu, masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam menyampaikan aspirasi politiknya kepada mereka yang berkuasa. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam pencarian dan penyelesaian masalah yang terjadi di bidang politik Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan. Akademisi, seperti guru, dan lainnya, dapat berperan dan memberi penyadaran dan penyuluhan kepada warga negara dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan mereka. Akibatnya, pendidikan menciptakan warga negara yang sadar politik. Hal ini penting agar warga negara tidak hanya mengambil bagian dalam pemilihan umum dan acara serupa, tetapi juga secara langsung berpartisipasi dalam proses politik untuk memberikan kritik, memberi masukan, dan mengontrol bagaimana pemerintahan yang dipilih oleh mereka beroperasi.

### **3.2. Membentuk masyarakat inklusif-partisipatif melalui pendidikan politik**

Sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, mempelajari prospek perkembangan masyarakat sipil di Indonesia merupakan tugas yang menantang. Dalam konteks Indonesia, elemen-elemen masyarakat sipil yang telah disebutkan sebelumnya, seperti otonomi, akses masyarakat ke lembaga negara, dan keberadaan arena publik yang mandiri dan terbuka, dapat digunakan untuk mempelajari perspektif ini. Faktor-faktor ini sangat memengaruhi seberapa efektif pendidikan politik dilaksanakan. Hal ini penting sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan politik memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara mengakses lembaga negara secara efektif. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi sangat berperan dalam proses pengambilan kebijakan dan mengontrol kinerja pemerintah, yang kemudian akan memperkuat keberadaan masyarakat sipil (Azhari dkk., 2025).

Pendidikan politik yang berkualitas memegang peran vital dalam memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. Namun, tantangan mendasar dalam

pengembangan masyarakat sipil di Indonesia terletak pada upaya menciptakan sistem pendidikan politik yang inklusif, yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di tengah kompleksitas ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan arena publik yang terbuka dan otonomi yang kokoh menjadi kunci untuk memastikan bahwa pendidikan politik dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung perkembangan demokrasi yang lebih matang.

Pada masa orde baru, warga Indonesia punya tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap negara. Hal ini disebabkan oleh program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah, serta kekuatan sistemik negara dalam koridor yuridis formal dan administrasi (An-naf, 2011). Kebijakan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) justru menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada negara. Lebih lanjut, negara pada masa itu cenderung melakukan intervensi yang besar dalam kegiatan masyarakat, bahkan tak jarang menggunakan tindakan represif (Purnaweni, 2004). Namun, sejak era Reformasi bergulir pada tahun 1998, terjadi pergeseran di mana masyarakat mulai mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah. Negara pun secara bertahap mulai mengurangi dominasinya dalam wilayah privat warga negara. Meskipun transformasi otonomi masyarakat ini belum sepenuhnya terwujud, namun adanya kecenderungan pengurangan penetrasi negara menjadi prospek positif bagi pengembangan masyarakat sipil sebagai basis demokratisasi.

Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat diberdayakan untuk menjadi lebih mandiri dan kritis terhadap negara. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu, sehingga masyarakat sipil dapat berfungsi secara efektif sebagai penyeimbang kekuasaan negara (Nelly, 2024). Hal ini karena, proses demokratisasi dan pendidikan politik telah membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat terhadap lembaga negara (Asrida dkk., 2021). Lembaga-lembaga eksekutif dan lembaga negara lainnya mulai membuka diri, memenuhi hak masyarakat atas informasi dan pelayanan publik. Langkah awal desakralisasi lembaga pemerintahan ini dimulai oleh Presiden Habibie dan diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan membuka Istana Negara. Sejak saat itu, akses warga negara pun semakin baik, yang ditunjukkan dengan berbagai aktivitas seperti menyampaikan aspirasi ke lembaga pemerintahan, melakukan dengar pendapat dengan anggota legislatif, dan melakukan unjuk rasa jika kebijakan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jika aktivitas ini terus dipelihara, maka akan menopang terciptanya masyarakat sipil sebagai elemen penting dalam proses demokratisasi.

Sayangnya, kemandirian organisasi publik yang terdiri dari organisasi sosial dan politik masih menjadi masalah. Tidak peduli dukungan atau peraturan yang dibuat oleh negara, partai politik, kelompok penekan, dan organisasi politik lainnya masih memiliki kekayaan yang cukup (Pasaribu, 2017). Selain itu, meskipun pemerintah dan organisasi sosial-politik secara formal tampaknya memiliki kekuatan yang sama, tekanan pemerintah terhadap partai politik seringkali lebih kuat dalam kenyataannya. Kemandirian dan representasi masyarakat juga belum sepenuhnya menjadi dasar rekrutmen politik. Keberpihakan banyak partai politik pada kepentingan pemerintah justru diperkuat oleh keterlibatan mereka dalam pemerintahan. Karena tujuan awal mereka adalah meraih kekuasaan, tindakan organisasi-organisasi ini di ruang publik masih cenderung berfokus pada negara daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kelompok sosial lain, seperti kelompok profesi, kelompok kepentingan, dan kelompok keagamaan, tidak memiliki aktivitas yang cukup untuk mengisi ruang publik secara mandiri. Media

massa, terutama media cetak, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dianggap memiliki kapasitas yang paling besar untuk berfungsi sebagai arena publik yang mandiri secara independen (Afriandi & Ariyadi, 2023; Pramestisari & Kebayantini, 2022).

Selain meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (Azhari dkk., 2025), pendidikan politik juga memiliki peran penting dalam membangun kemandirian arena publik. Dengan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, pendidikan politik dapat mendorong partai politik dan organisasi masyarakat untuk menjadi lebih representatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pendidikan politik juga dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi masyarakat sipil dan media massa sehingga dapat memperkuat fungsi kontrol publik terhadap negara (Wardhani, 2018). Seperti yang terlihat dalam respons terhadap RUU Sisdiknas, heterogenitas dan perpecahan sosial di Indonesia menghalangi ruang publik yang terbuka. Karenanya, pengembangan masyarakat sipil dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu 1) menciptakan keluarga demokratis dengan kesetaraan gender, 2) meningkatkan peran LSM dalam pendidikan dan menjembatani masyarakat dengan negara, 3) mengoptimalkan peran mahasiswa dalam partisipasi politik dan peningkatan kualitas hidup, dan 4) menyelenggarakan pendidikan politik yang sistematis dan inklusif, bukan indoktrinasi (Ridwan, 2019). Dengan demikian, pendidikan politik yang inklusif menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini untuk memberdayakan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan mewujudkan masyarakat sipil yang kuat.

### **3.3. Pendidikan politik dan strategi pembangunan demokrasi berkelanjutan**

Untuk mewujudkan pembangunan demokrasi berkelanjutan, diperlukan strategi yang mencakup penguatan kapasitas organisasi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi dan partisipasi publik. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk dalam hal manajemen, penggalangan dana, serta kemampuan advokasi dan komunikasi publik. Penguatan kapasitas ini sangat penting agar OMS mampu berperan aktif sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan pasar. Selain itu, peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam demokrasi juga dipengaruhi oleh kemampuan menjalin kemitraan strategis, baik dengan pemerintah, sektor swasta, maupun media, untuk memperluas pengaruh dan mempercepat pencapaian tujuan bersama. Strategi lainnya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dan penguatan kesadaran kritis terhadap isu-isu publik. Masyarakat sipil yang kuat dan aktif adalah pilar utama dalam demokrasi yang sehat karena mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan akuntabilitas publik (Diamond, 1994). Oleh karena itu, sinergi antara penguatan internal organisasi, jejaring eksternal, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan pembangunan demokrasi berkelanjutan di era kontemporer.

Dengan membekali warga negara, terutama generasi muda, dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kinerja masyarakat sipil di Indonesia. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta cara berkontribusi positif pada proses demokrasi (Belladonna, 2018; Prayugo & Prayitno, 2022). Dalam konteks pendidikan, beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas masyarakat sipil di Indonesia. Pertama, setiap mahasiswa dapat

belajar tentang kepemimpinan, partisipasi publik, dan dinamika politik melalui organisasi kemahasiswaan. Kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kesadaran politik mahasiswa, menumbuhkan nasionalisme, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bangsa dan negara (Rahmawati, 2022). Kedua, pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Di tingkat sekolah menengah, mata pelajaran PKn merupakan salah satu strategi penting dalam pendidikan politik. Terkait hal ini, Mulyadi & Anyan (2019) menunjukkan bahwa melalui metode bermain peran dan diskusi dalam pembelajaran PKn, peserta didik dapat meningkatkan kesadaran politik mereka yang tercermin dalam sikap kritis dan tanggung jawab dalam kegiatan sekolah.

Selanjutnya, strategi lain yang juga dapat diterapkan adalah melalui implementasi pendidikan politik oleh pemerintah daerah. Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) adalah lembaga yang dimiliki pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan politik bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pendidikan politik kewarganegaraan, kompetisi pemilihan ketua OSIS, dan pelatihan melalui media sosial, yang ditujukan untuk berbagai kelompok masyarakat (Wardhani, 2018). Sementara itu, pendidikan politik dalam konteks globalisasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam dinamika politik. Sejalan dengan itu, pendidikan politik harus mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ini sangat penting untuk pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi di era modern (Jamal & Goo, 2021). Hal ini penting karena pendidikan demokrasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam pemilu, karena masyarakat dapat memahami pentingnya hak mereka untuk memilih dan berpartisipasi aktif dalam pemilu, yang menghasilkan pemimpin yang baik.

Dalam konteks kebijakan, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk merancang dan menerapkan strategi pendidikan politik yang inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dukungan kebijakan harus diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, pengembangan kurikulum yang partisipatif dan kontekstual, serta penguatan kapasitas fasilitator dan aktivis masyarakat dalam menjalankan kegiatan pendidikan politik di berbagai level. Secara keseluruhan, pembangunan masyarakat sipil yang kuat dan demokratis di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan pendidikan politik dalam membentuk warga negara yang otonom, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui edukasi yang tepat sasaran dan inovatif, masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial yang mampu mengawasi pemerintah, memediasi konflik, dan memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, upaya memperkuat pendidikan politik dan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional demi terciptanya sistem demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan diskusi yang dibahas dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk memperkuat masyarakat sipil dan meneguhkan dasar demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab, hak, dan mekanisme sistem politik; itu juga membentuk warga negara yang kritis, sadar politik, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Oleh

karena itu, pendidikan ini berfungsi sebagai alat taktik untuk membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berpikiran kritis yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan prinsip supremasi hukum, kesetaraan, dan keadilan. Namun, perjalanan implementasi pendidikan politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satunya adalah minimnya integrasi kurikulum yang partisipatif dan kontekstual dalam sistem pendidikan formal, sehingga proses pembelajaran menjadi terlalu normatif dan kurang relevan terhadap dinamika politik lokal dan nasional. Selain itu, ketimpangan akses pendidikan politik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia turut menjadi hambatan besar, mengingat daerah-daerah tertinggal dan wilayah perbatasan sering kali kekurangan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran politik yang efektif. Budaya politik yang hierarkis dan dominasi aktor-aktor elite juga mempersempit ruang diskursus dan partisipasi masyarakat luas, sehingga menghambat terciptanya masyarakat yang benar-benar otonom dan kritis.

Sebagai alternatif dan solusi, berbagai inovasi dan strategi telah dikembangkan, salah satunya dengan mengusung pendidikan politik berbasis komunitas dan literasi budaya. Contohnya adalah inisiatif Rumah Dunia di Banten yang mampu menyelenggarakan pendidikan politik melalui pendekatan literasi budaya, kampanye anti-korupsi, dan diskusi publik berbasis komunitas yang partisipatif dan kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak harus selalu formal dan terstruktur, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan non-formal yang mendekatkan warga ke isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan sosial media dan TIK dapat memperluas jangkauan pendidikan politik, meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat secara digital dalam era globalisasi dan digitalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, F., & Ariyadi, F. (2023). Peranan masyarakat sipil dalam demokrasi: Studi kasus LSM kelompok kerja 30 dan jaringan advokasi tambang dalam permasalahan korupsi di Kota Samarinda-Kalimantan Timur Tahun 2014. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1902>
- Agustina, D. S. N. (2024). Civil Society of cooperation studies: A systematic literature review (SLR). *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 39–54. <https://doi.org/10.70214/pvjs1a32>
- An-naf, J. (2011). Tinjauan analitis terhadap model pembangunan Indonesia. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 68–82.
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil society, demokrasi dan demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 131–142. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Azhari, S., Wibawani, S., & Millensyah, E. W. (2025). Pengaruh Pendidikan politik terhadap partisipasi politik generasi Z pada pilkada serentak 2024. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(4), 3190–3196. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.5206>
- Belladonna, A. P. (2018). Implementasi fungsi partai politik sebagai wahana pendidikan politik di masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 31–42. <https://doi.org/10.31571/pkn.v2i2.956>

- Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17.
- Erfain, E. (2025). Resiliensi civil society di tengah polarisasi sosial-politik dalam perspektif demokrasi deliberatif. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(1), 103–115. <https://doi.org/10.91989/keqtge68>
- Hadi, O. (2010). Peran Masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117–129. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.674>
- Jamal, O., & Goo, E. (2021). Meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi melalui pendidikan politik di SMK N 1 Jayapura. *Jurnal DIKMAS*, 3(1), 10–13. <https://doi.org/10.55606/dikmas.v3i1.428>
- Jayadi, S., Ardilansari, A., Isnaini, I., Maemunah, M., Mayasari, D., & Winata, A. (2023). Dampak pendidikan Pancasila terhadap Pemahaman siswa tentang demokrasi dan hak asasi manusia. *Seminar Nasional Paedagogia*, 3(0), 503–512.
- Jb, M., & Darmawan, L. (2016). Wacana civil society (masyarakat madani) di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35–64. <https://doi.org/10.14421/jsr.v10i2.1157>
- Mulyadi, Y. B., & Anyan, A. (2019). Pendidikan politik melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran politik siswa. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.21067/jip.v9i1.2904>
- Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i1.119>
- Nugroho, W. (2012). Konsistensi pemerintah Indonesia dalam political will pasca keikutsertaan ratifikasi perjanjian internasional di bidang HAM. *Jurnal Hukum Unissula*, 28(2), 1025–1060.
- Nurfadilah, S. (2018). *Partisipasi politik civil society dalam pilkada: Studi kasus Rumah Dunia dalam pilkada Banten 2017* [Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. <http://ip.fisip-untirta.ac.id>
- Nursahid, F. (2022). Membangun organisasi masyarakat sipil yang sehat dan akuntabel. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.33822/jpds.v3i1.5924>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Pramestisari, N. A. S., & Kebayantini, N. L. N. (2022). Eksistensi organisasi masyarakat sipil dalam dinamika sistem demokrasi di Indonesia. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6187>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan politik sebagai proses belajar membentuk kesadaran politik dan peran kewarganegaraan. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 118–131.

- Rahmawati, A. (2022). Peranan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 244–250. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1671>
- Ridwan, T. A. (2019). *Implementasi pendidikan berkarakter dalam menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama siswa* [Master Thesis]. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman sepihak melalui media sosial dalam persepsi kebinekaan dan hak asasi manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131–153. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.146>
- Sitepu, E. (2016). Peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang berkarakter terhadap masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Sains*, 2(1), 1–8.
- Sitepu, S. (2024). Pendidikan politik sebagai sarana meningkatkan kesadaran sipil di masyarakat. *Literacy Notes*, 2(1), 1–8.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Yasa, I. W. D., Sanjaya, D. B., & Suastika, I. N. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai kesadaran politik di kalangan generasi muda. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 5(6), 10. <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i6.2025.10>
- Yunita, S., Milala, E. B., Siregar, M., Gaol, R. L., & Panjaitan, R. (2025). Analisis kritis pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum Indonesia. *Indonesian Journal of Learning Studies (IJLS)*, 5(2), 69–78. <https://doi.org/10.53769/ijls.v5i2.1664>